



Brazil: Mendorong Sebuah Kerangka Kebijakan Kehutanan Yang Progresif

Rights and Resources Initiative telah mempengaruhi perubahan kebijakan dan membantu program-program pembaruan tenurial tenurial di Brazil yang berdampak pada lebih dari satu juta orang Brazil dan 200 juta hektar hutan

- + Di negara bagian Acre pada Juli 2007, RRI mengumpulkan pemimpin dari 40 negara untuk bertemu dengan para aktivis hutan, pemimpin masyarakat, dan pejabat dalam konferensi yang diliput secara baik yang merupakan terobosan dalam upaya untuk menggalang dukungan politis bagi pembaruan tenurial hutan di Brazil
- + Langkah-langkah oleh sektor pemerintah dan swasta, didukung secara luas oleh kerangka intelektual yang disediakan oleh RRI, telah berdampak luar biasa, dan Brazil bergerak cepat untuk merangkul pengelolaan hutan oleh masyarakat (*community forest management*)
- + Pada bulan Juni 2009, pemerintahan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva mengumumkan penetapan kebijakan nasional kehutanan masyarakat (*community forestry*) untuk memajukan pengelolaan berkelanjutan atas hutan yang dimanfaatkan oleh petani, pemukim, masyarakat adat, dan masyarakat hutan

Selama satu minggu pada Juli 2007, kota Rio Branco di Brazil, di jantung Amazon, menjadi ibukota dunia untuk kehutanan masyarakat (*community forestry*). Peserta dari 40 negara berkumpul untuk menyelidiki gejala munculnya usaha-usaha kehutanan berbasis masyarakat (*community-based forest enterprises*), usaha kecil yang dinamis yang memanfaatkan kekayaan luar biasa dari bakat kewirausahaan yang ada di kalangan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Didorong oleh ajakan dan prakarsa RRI, yang memulai hubungan mereka dengan Badan Kehutanan Brazil pada 2006 melalui *MegaFlorestais* (jejaring para pimpinan lembaga kehutanan dari 10 besar negara berhutan yang dikoordinasikan oleh RRI), konferensi dunia tersebut diliput secara luas oleh wartawan yang bertugas di Brazil dan oleh surat-surat kabar dan majalah-majalah terkemuka di Rio de Janeiro, São Paulo, dan Brasilia. Masyarakat Brazil dan para pembuat kebijakan semuanya menyaksikan ketika masyarakat hutan Brazil menceritakan kisah mereka dan berbagi pengalaman dengan rekan-rekan mereka dari seluruh Negara berkembang dan mengorganisir advokasi mereka. Kepada para pemimpin politiknya, mereka menuntut diakhirinya berbagai hambatan terhadap akses ke pasar, bahan-bahan, dan investasi. Konferensi tersebut memacu dukungan politis yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pembaruan tenurial di Brazil, yang memberi kesempatan bagi pejabat pemerintah dan kelompok masyarakat untuk secara bersama-sama melangkah maju.

Konferensi Internasional mengenai Pengelolaan dan Usaha Hutan oleh masyarakat tersebut dalam banyak hal berbeda dari biasanya. Konferensi ini mempercepat proses dilakukannya perbincangan tingkat tinggi pertama kali antara pemimpin masyarakat hutan dari seluruh Brazil dengan Menteri Lingkungan Hidup (Marina Silva pada waktu itu). Peristiwa tersebut membawa 300 orang pemimpin dan pendukung usaha kehutanan oleh masyarakat ke Acre untuk bertemu dengan para penentu kebijakan pemerintah dari Afrika, Asia, dan Amerika Tengah dan Selatan.

RRI telah berperan menentukan. Ini mutlak karena mereka menyediakan bantuan logistik dan landasan intelektual yang membawa gerakan ini melangkah maju. Dan mereka membawa gagasan-gagasan yang kami dapat gunakan sebagai titik tolak, daripada sekadar memberi tahu kami hal-hal yang perlu dilakukan.

Luiz Carlos Joels
Serviço Florestal Brasileiro

Para mitra RRI dalam penyelenggaraan konferensi tersebut termasuk Badan Kehutanan Brazil, International Tropical Timber Organization atau ITTO, dan Global Alliance of Community Forestry, yang bekerjasama dengan pemerintah Brazil dan IUCN. Pemerintah negara bagian Acre dan pemerintah Brazil menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi tersebut.

Para peserta berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil dengan pengalihbahasaan yang simultan dan informal dalam empat bahasa. Pada penghujung acara, mereka membuat deklarasi yang keras, menuntut pengakuan atas arti pentingnya masyarakat hutan dalam memajukan pembangunan ekonomi dan konservasi, dan diakhirinya kendala politis, hukum, dan keuangan yang menghambat masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi bangsa-bangsa mereka.

Pada forum lain yang bersamaan, para pemimpin masyarakat hutan dari seluruh Brazil menyelenggarakan pertemuan-pertemuan sendiri untuk melaporkan pengalaman Brazil berkaitan dengan tema-tema global yang dibahas pada acara tersebut. Mereka melaporkan mengenai kurangnya landasan kebijakan nasional untuk mendorong dan membantu masyarakat hutan, dan mencatat lemahnya kekuatan politik mereka untuk mengatasi luasnya kendala kebijakan. Mereka juga menyusun sebuah rencana dan strategi untuk menetapkan kebijakan tingkat nasional guna mendukung kehutanan masyarakat.

RRI juga membantu memperjelas arti pentingnya melibatkan masyarakat hutan dalam proses pembuatan keputusan. Konferensi di Acre tersebut memberi kesempatan kepada para pembuat kebijakan untuk mendengar hal-hal yang para pemimpin masyarakat harus katakan.

Luiz Carlos Joels
Serviço Florestal Brasileiro

RRI melanjutkan hubungannya dengan kepemimpinan sektor kehutanan di Brazil mengenai pembaruan tenurial hutan dan kebijakan kehutanan melalui undangan untuk ikut dalam dialog-dialog kunci di tingkat internasional dan khususnya dengan bekerja secara dekat selama *MegaFlorestais*, di mana Brazil telah menjadi ketua-bersama sejak 2007.

Menurut Luiz Carlos Joels, yang pensiun baru-baru ini dari jabatan Direktur *Serviço Florestal Brasileiro* (Badan Kehutanan Brazil), Program Nasional Kehutanan masyarakat Brazil merupakan salah satu dari banyak hasil konferensi 2007 dan hubungan yang terus berlanjut RRI. Diluncurkan pada bulan Juni 2009, program nasional tersebut mencakup lembaga Incra (mewakili permukiman), Funai (masyarakat adat), dan ICMbio (penduduk di kawasan konservasi), yang secara keseluruhan mewakili kira-kira 1.3 juta penduduk Amazon.

“Kami telah memulai proses perubahan, tetapi RRI membantu menciptakan ruang intelektual yang kami butuhkan untuk memahami persoalan dan membuat pilihan yang benar bagi Brazil,” kata Joels.

Pada sebuah kesempatan yang dramatis dalam konferensi, para pemimpin masyarakat menyerahkan surat kepada Menteri Marina da Silva, meminta para pejabat pemerintah Brazil untuk bertemu dengan para pemimpin masyarakat dan kelompok serikat pekerja untuk membangun sistem dukungan bagi pengelolaan hutan oleh masyarakat. Pertemuan ini menyebabkan pemerintah berkomitmen untuk merancang proses dan kebijakan kehutanan masyarakat nasional, sebuah proses yang dipelopori oleh Badan Kehutanan Brazil dengan instansi-instansi pemerintah terkait lainnya.

Dua tahun setelah konferensi di Acre tersebut, pada tanggal 5 Juni 2009, Presiden Luis Inácio Lula da Silva menandatangani keputusan yang menetapkan Program Federal mengenai Keluarga dan Kehutanan masyarakat untuk memajukan pengelolaan berkelanjutan atas hutan yang dimanfaatkan oleh petani, pemukim peserta program reformasi agraria, dan masyarakat adat. Para pejabat federal juga setuju untuk melaksanakan program nasional yang menyediakan bantuan keuangan, teknis, dan hukum bagi pelaksana program kehutanan masyarakat.

“Tekanan dari masyarakat telah sedemikian besar sehingga lembaga-lembaga lain yang bergerak dalam bidang kehutanan telah mulai mengurus kehutanan masyarakat,” kata Joels. “Jalan masih panjang, tetapi upaya-upaya awal yang penting telah dilakukan, dan RRI telah berperan menentukan. Ini mutlak karena mereka menyediakan bantuan logistik dan landasan intelektual yang membawa gerakan ini melangkah maju. Dan mereka membawa gagasan-gagasan yang kami dapat gunakan sebagai titik tolak, daripada sekadar memberi tahu kami hal-hal yang perlu dilakukan.”